

**PENGARUH IT GOVERNANCE PERFORMANCE
TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**Nadya Novianty, SE.,MSA.,Ak
M. Zulfadhilah, M.Kom**

**NIK. 1166032019146
NIK. 1166052017097**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS SARI MULIA
BANJARMASIN
2020**

PENGARUH IT GOVERNANCE PERFORMANCE TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)

Nadya Novianty^{1*}, M. Zulfadhilah²

¹Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Humaniora Universitas Sari Mulia

²Program Studi Sarjana Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sari Mulia

*E-mail: naaddy@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: *IT Governance* (ITG) merupakan bagian integral dari *corporate governance* yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi. ITG merupakan proses untuk memastikan bahwa teknologi informasi dalam organisasi mampu mendukung dan mengembangkan strategi dan tujuan organisasi.

Tujuan: mengetahui pengaruh kinerja *IT Governance* terhadap transparansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 152 responden dengan menggunakan convenience sampling sebagai teknik penyampelan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah dengan menggunakan alat analisis Partial Least Squares.

Hasil: Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kinerja *IT Governance* dan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap transparansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Simpulan: *IT Governance Performance* merupakan bagian dari implementasi *good governance* yang akan menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan. Jaminan tersebut dapat dibuktikan secara empiris melalui hasil penelitian ini, bahwa kinerja tata kelola TI yang efektif dapat memengaruhi transparansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: *IT Governance Performance*, Transparansi, *IT Governance*

Pendahuluan

IT Governance (ITG) merupakan bagian integral dari corporate governance yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi. ITG merupakan proses untuk memastikan bahwa teknologi informasi dalam organisasi mampu mendukung dan mengembangkan strategi dan tujuan organisasi (ITGI, 2006). Tata kelola TI sangat

diperlukan untuk tetap menjaga investasi, meningkatkan daya saing, memberikan nilai tambah dan menjaga keberlangsungan bisnis atau pemerintahan (Setiawan, 2010). ITG berkembang tidak hanya pada sektor privat, tetapi juga berkembang pesat pada sektor publik atau institusi pemerintahan. ITG pada sektor publik merupakan layanan TI yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat

melalui pelaksanaan kekuasaan, dan pihak berwenang yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan dan kepentingan publik. Penerapan ITG dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan dan pengembangan e- government. Brown dan Brudney (2001) mendefinisikan e- government sebagai penggunaan teknologi, khususnya aplikasi berbasis web untuk meningkatkan akses dan secara efisien memberikan informasi dan layanan pemerintah. Tujuan akhir dari terwujudnya ITG adalah terwujudnya praktik good governance bagi organisasi yang menerapkannya. Tiga prinsip utama dari good governance adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Transparansi merupakan salah satu roh perwujudan good governance. Tolbert dan Mossberger (2006) menguji perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan e-government dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan e- government meningkatkan persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah.. Cuillier dan Piotrowski (2009)

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa mempublikasikan informasi yang relevan di situs web e-government dapat meningkatkan transparansi. Al Gore dan Tony Blair mengatakan bahwa salah satu manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e- government bagi suatu negara (Indarjit, 2004: 5) adalah meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Penelitian mengenai hubungan antara kinerja ITG dan transparansi masih sedikit dibuktikan melalui penelitian empiris, oleh sebab itu peneliti termotivasi untuk

Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif yang menekankan pada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengukuran variabel penelitian dan analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang melaksanakan pengembangan e-government.

Jumlah OPD yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 50 OPD. Data sampel sebanyak 250 sampel dengan pertimbangan adanya kuesioner yang tidak kembali dan tidak lengkap diisi responden, sehingga jumlah sampel minimal tetap dapat terpenuhi. Hal tersebut diyakini akan dapat merepresentasikan keseluruhan populasi yang telah ditentukan. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Model persamaan struktural pada penelitian untuk menguji pengaruh hubungan antara IT Governance Performance dan Transparansi.

Hasil

Jumlah kuesioner yang disebarkan oleh peneliti adalah sebanyak 250 kuesioner, dari seluruh 250 kuesioner yang telah disebarkan, sebanyak 53 kuesioner tidak kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 45 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi, diisi tetapi tidak lengkap, dan diisi lengkap namun responden tidak serius dalam pengisiannya. Sehingga total

kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 152 kuesioner.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	63	41,4
Laki-laki	89	58,6
Total	152	100,0
Umur Responden		
≤ 25 Tahun	18	11,8
26 - 40 Tahun	84	55,3
41 - 55 Tahun	46	30,3
≥ 56 Tahun	4	2,6
Total	152	100,0
Pendidikan Terakhir Responden		
D3	22	14,5
S1	96	63,2
S2	34	22,4
Total	152	100,0
Status Kepegawaian Responden		
Honor	43	28,3
PNS	109	71,7
Total	152	100,0
Lama Bekerja Responden		
< 10 tahun	84	55,3
> 30 tahun	5	3,3
11-20 tahun	28	18,4
21-30 tahun	35	23,0
Total	152	100,0

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 89 (58,6%) responden. Sebagian besar responden berusia 26 - 40 tahun yaitu sebanyak 84 (55,3%) responden. Sebanyak 96 (63,2%) responden berpendidikan akhir S1. Sebagian besar responden penelitian ini berstatus PNS di

sebanyak 109 (71,7%) responden dan sebanyak 84 (55,3%) responden telah bekerja di OPD Provinsi Kalimantan Selatan kurang dari 10 tahun.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Variabel	Item Pertanyaan	Rata-Rata Skor
IT Governance Performance (X)	X.1	5,7
	X.2	5,9
	X.3	6,0
Transparansi (Y)	Y.1	5,5
	Y.2	5,5
	Y.3	5,3
	Y.4	5,3
	Y.5	5,6

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2020

Tabel 3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Keterangan	Koefisien Path	P-value
H1	X → Y	0,26	<0,01

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa IT Governance Performance berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh IT Governance Performance (X) terhadap transparansi (Y) signifikan pada $\alpha = 0,05$, dilihat melalui nilai p-value sebesar $<0,01$, nilai tersebut lebih kecil daripada $0,05$ ($\alpha = 5\%$). Koefisien sebesar 0,26 bertanda positif mengindikasikan hubungan keduanya searah dan signifikan, artinya semakin baik kinerja dan tata kelola TI di suatu OPD akan meningkatkan transparansi OPD tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa $H_0 =$ diterima. Hal ini berarti semakin efektif kinerja tata kelola TI di suatu OPD akan meningkatkan transparansi OPD tersebut. Tujuan akhir dari terwujudnya tata kelola TI adalah terwujudnya praktik good governance bagi organisasi yang menerapkannya. Dalam konteks sektor publik, tiga prinsip utama dari good governance sendiri adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Welch dan Wong (2001) menyatakan bahwa tekanan IT secara global terhadap organisasi publik mendorong pengadaan, penerapan, akuntabilitas dan transparansi. Jika program software berbasis online/ e-government dijalankan secara ideal, maka prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik tersebut akan berjalan secara efektif, pelaksanaan tata kelola TI melalui pengembangan e-government dapat meningkatkan dimensi pertanggungjawaban itu sendiri yaitu: transparansi, pengendalian, tanggung jawab, dan daya tanggap.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tolbert dan Mossberger

(2006), menguji perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan e-government dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government meningkatkan persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah. Selanjutnya, Cuillier dan Piotrowski (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa mempublikasikan informasi yang relevan di situs web e-government dapat meningkatkan transparansi.

Daftar Pustaka

- Ali, S. dan Green, P. 2005. Determinants of Effective IT governance Mechanisms. In proceedings of International IT Governance Conference, Auckland, New Zealand.
- Ali, S., P. Green, dan M. Parent. 2009. The Role of a Culture of Compliance in Information Technology Governance. Paper read at International Workshop on Governance, Risk and Compliance
- Brown, M. M., & Brudney, J. L. .2001. Achieving advanced electronic government services: An examination of obstacles and implications from an international perspective. Paper presented at the National Public Management Research Conference, Bloomington, IN.
- Cuillier, David, and Suzanne J. Piotrowski. (2009) "Internet Information-Seeing and Its Relation to Support for Access to Government Records." *Government Information Quarterly* 26 (3): 441–9
- Hair, Joseph F, Black, William C, Babin Barry J and Anderson Rolph E. (2010). *Multivariate Data Analysis A Global Perspective*. Seventh Edition. Pearson.
- Nurrizkiana, B., L. Handayani, dan E. Widiastuty. 2016. Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 18 (1), 28- 47.
- Nurhadryani, Y. (2009). Memahami Konsep E-Governance Serta Hubungannya Dengan E-Government Dan E-Demokrasi. Seminar Nasional Informatika 2009. UPN"Veteran" Yogyakarta.
- Nfuka, E.N. dan Rusu, L. 2010. Critical success factors for effective IT governance in the public sector organizations in a developing country: the case of Tanzania. *Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems, University of Pretoria, Pretoria*, pp. 1-15.
- Nfuka, E.N, dan Rusu, L. 2011. The Effect of Critical Success Factors on IT Governance Performance", *Industrial Management & Data Systems*, 111(9): 1418-1448.
- Tolbert, C. J., dan K. Mossberger. 2006. The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. *Public Administration Review*, 354-369.
- Welch, E.W. and Wong, W. (2001) Global Information Technology Pressure and Government Accountability: The Mediating Effect of Domestic Context on Website Openness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 11, 509-538.